



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BENGKALIS**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN 2026**



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Hasil Evaluasi adalah hasil penilaian terhadap proses pemantauan dan pengendalian terhadap hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Rencana Kerja adalah rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program dan tersaji kelompok belanja aktivitasnya didalam sub kegiatan pada RKA SKPD.
17. Pendanaan adalah pagu indikatif yang disusun berdasarkan prioritas dan perhitungan kemampuan keuangan daerah.
18. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang disusun berdasarkan prioritas dan perhitungan kemampuan keuangan daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun mempedomani Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Oktober 2025



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 44

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan pelaksanaan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini menyajikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah pada tahun 2026 yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 ini.



Bengkalis, 10 Oktober 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis,

SALMAN ALFARISI, S.T.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19820519 201102 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis	8
2.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	45
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026	48
2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Permasalahan Masyarakat	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	62
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi	62
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	76
BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	82
4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	82
BAB V PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matrik Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	9
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	14
Tabel 2.3	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	16
Tabel 2.4	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	21
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Program Tahun 2024	32
Tabel 2.6	Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023-2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	32
Tabel 2.7	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	35
Tabel 2.8	Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	35
Tabel 2.9	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	36
Tabel 2.10	Review Terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis 2026	49
Tabel 2.11	Usulan Jenis Pelatihan, Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 Berdasarkan Skala Prioritas	61
Tabel 3.1	Prioritas Daerah, Rumusan Masalah dan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2026	79
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026	80
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026	80
Tabel 4.1	Rancangan Akhir Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2024	11
Gambar 3.1.	Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	81

BAB I

PENDAHULUAN

=====

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Tahun Anggaran 2024, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pencapaian Rencana Strategis 2021-2026, serta pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026, secara khusus Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan sepenuhnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dari sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2026 secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia”, telah melaksanakan serangkaian proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2026 dengan membaurkan proses *Top Down Planning* dengan *Bottom Up Planning*.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merujuk dan berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

20. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 Nomor 63).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu 2026 adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu sampai akhir tahun anggaran 2026 serta agar dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai berdasarkan target-target kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu 2026 antara lain:

- a. Untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;

- b. Memberikan informasi yang komprehensif dan terstruktur terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, khususnya yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis selaku Kepala Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2026 disusun dengan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2026 serta sistematika penulisan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yang dikaitkan dengan pencapaian target

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis

2.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Permasalahan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi serta perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 memuat tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan periode tahun 2021-2026 serta indikator-indikator capaian kinerja setiap tahun anggaran perjalanan Rencana Strategis dimaksud. Untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis memuat 7 (tujuh) sasaran yakni menurunnya angka pengangguran, meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan, meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, menurunnya kasus ketenagakerjaan, meningkatnya kemandirian dan keberdayaan transmigran, terlaksananya perencanaan tenaga kerja daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dengan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis antara lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama, persentase pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi, persentase pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi, persentase ketersediaan data ketenagakerjaan dan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Bengkulu tahun 2022, 2023 dan 2024 maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu pun mengalami perbaikan pada sasaran strategis maupun Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga menjadi lebih sederhana namun tidak mengurangi *esensi* dari tujuan dan sasaran kebijakan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu.

Tabel 2.1. Matrik Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021				Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2022-2023						Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2024			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi (%)		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		(%)	(%)			2022	2023	2022	2023			(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Menurunnya Angka Pengangguran	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	36,89	66,76	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	95,00	96,00	92,82	92,91	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,03	5,88
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,15	6,63										

Dengan adanya perubahan sasaran strategis tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 sehingga target capaian sasaran strategis, target capaian sasaran pendukung sasaran strategis maupun capaian program kegiatan dan sub kegiatan dapat lebih terintegrasi dan tersinkronisasi. Disamping itu juga dengan telah disahkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan sinkronisasi kode rekening program, kegiatan, sub kegiatan

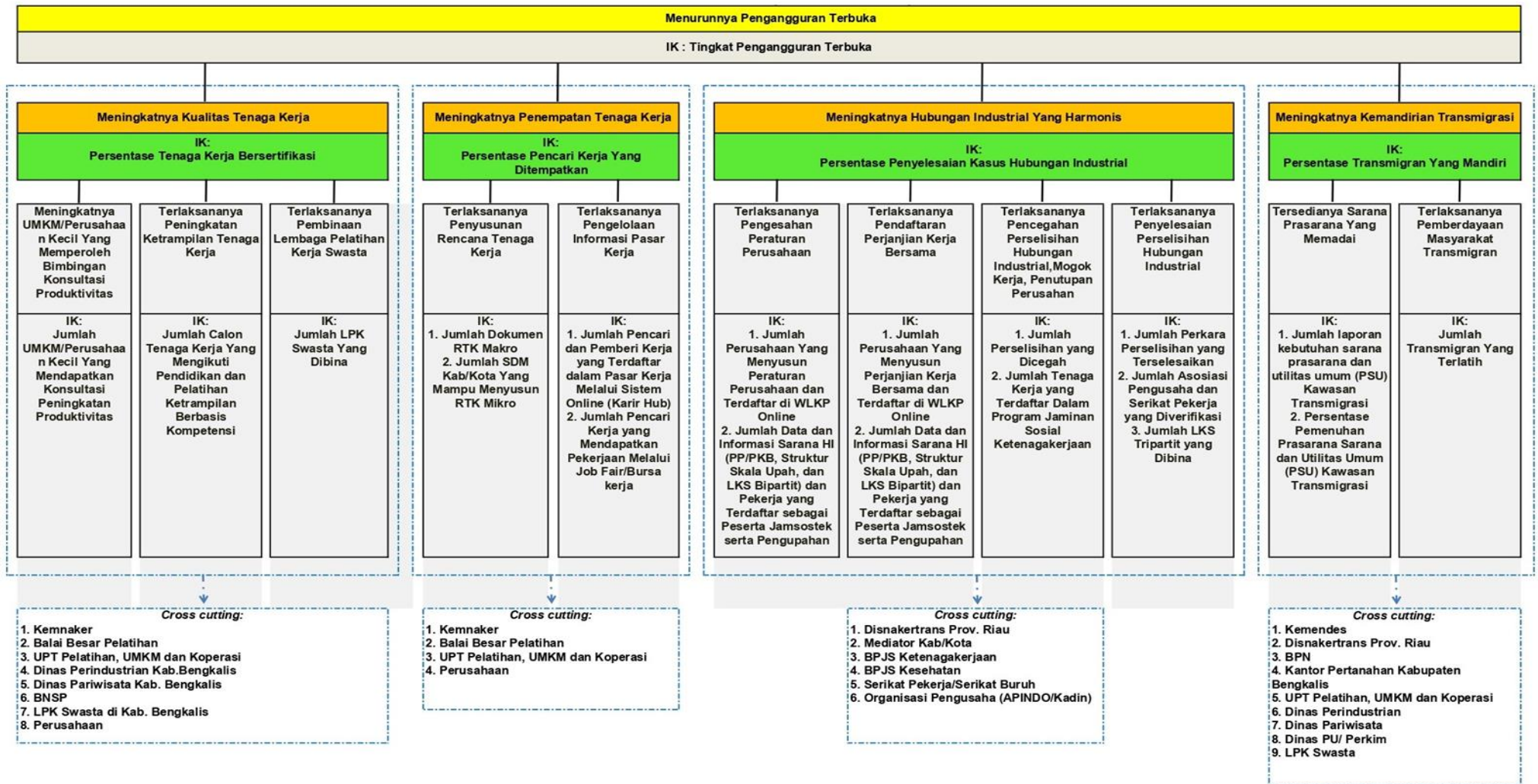
dan akun belanja yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada dokumen Rencana Kerja tahun berjalan.

Peran strategis yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Sebagai institusi strategis dalam perencanaan ketenagakerjaan daerah, pemberdayaan dan pembinaan lingkup transmigrasi;
2. Sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan kompeten, penciptaan lapangan kerja, wirausaha mandiri, pembinaan masyarakat produktif serta peningkatan kerjasama jejaring sosial masyarakat;
3. Sebagai koordinator hubungan industrial dalam menyongsong Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera.

Pelaksanaan kinerja dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari indikator yang terukur. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengelolaan pencapaian (*managing of result*) tidak terlepas dari adanya Pohon Kinerja. Pohon kinerja merupakan penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja dibawahnya dan merupakan alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Dalam rangka memperbaiki proses penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu dan dengan desain strategi/program/kegiatan, maka perlu didasarkan pada proses membangun model logis (*logic model*) maupun kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang tepat.

Gambar 2.1 Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2024



Penekanan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Isu strategis yang masih menjadi perhatian di sektor ketenagakerjaan adalah aspek penyerapan angkatan kerja. Pertama, pertumbuhan angkatan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan dunia industri atau kesempatan kerja. Kedua, belum terserapnya angkatan kerja karena belum ada *link and match* antara calon tenaga kerja dengan dunia industri. Ketiga, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menggeser peluang kerja yang awalnya dilakukan oleh manusia menjadi mesin. Keempat, perlu adanya *link and match* dalam mempersiapkan calon tenaga kerja agar memenuhi tren industri kedepan. Tantangan dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia yaitu bonus demografi, yang artinya bahwa produktivitas harusnya meningkat karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif.

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis selain mengacu pada kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau juga merujuk pada kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun berikutnya berdasarkan telaahan terhadap prioritas nasional dan telaahan prioritas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator makro Angka Pengangguran dilaksanakan melalui 4 (empat) program urusan ketenagakerjaan yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial dan 2 (dua) program urusan ketransmigrasian yakni Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bengkalis dari sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Tahun 2024 pembangunan daerah difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan memajukan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan pariwisata. Pembangunan perekonomian diharapkan lebih terintegrasi dengan infrastruktur pendukung yang kokoh dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih cepat. Pembangunan perekonomian baik pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata yang mengarah pada industrialisasi dikuatkan pada penggalan ini dan dikoordinasikan secara lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terutama pada lokasi-lokasi pengembangan ekonomi potensial dan merupakan prioritas nasional serta lokasi prioritas perbatasan negara.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang mengemban tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian memiliki tugas dan tanggung jawab pada Misi ke-1 (satu) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yakni “Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian” yang akan ditempuh dengan meningkatkan penanganan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kontribusi Non Migas Terhadap Perekonomian Daerah	Angka Pengangguran	%	8,54
1.1	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,03
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB

Tahun 2024 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 681.884 (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat) orang, 348.949 (tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) orang laki-laki dan 332.935 (tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima) orang perempuan. Naik 3,50% (tiga koma lima puluh persen) poin atau setara dengan 23.038 (dua puluh tiga ribu tiga puluh delapan) orang dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 658.846 (enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) orang yang terbagi ke dalam 336.794 (tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) orang laki-laki dan 322.052 (tiga ratus dua puluh dua ribu lima puluh dua) orang perempuan.

Penduduk Usia Kerja (PUK) Kabupaten Bengkalis sebanyak 431.131 (empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh satu) orang yang terbagi menjadi 220.416 (dua ratus dua puluh ribu empat ratus enam belas) orang laki-laki dan 210.715 (dua ratus sepuluh ribu

tujuh ratus lima belas) orang perempuan. Naik 1,37% (satu koma tiga puluh tujuh persen) poin dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 425.312 (empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua belas) orang dengan kategori Penduduk Usia Kerja (PUK) laki-laki sebanyak 217.604 (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus empat) orang dan perempuan sebanyak 207.708 (dua ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan) orang.

Terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 18.788 (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang atau setara dengan 7,15% (tujuh koma lima belas persen) dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 262.657 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) orang sehingga pada tahun 2024 jumlah angkatan kerja Kabupaten Bengkalis menjadi 281.445 (dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima) orang dengan kategori 187.559 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan) orang laki-laki dan 93.886 (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam) orang perempuan.

Tahun 2024 masyarakat yang menganggur di Kabupaten Bengkalis berjumlah 16.561 (enam belas ribu lima ratus enam puluh satu) orang, turun 2.059 (dua ribu lima puluh sembilan) orang atau setara dengan 11,06% (sebelas koma nol enam persen) poin dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 18.620 (delapan belas ribu enam ratus dua puluh) orang. Jumlah masyarakat yang menganggur Kabupaten Bengkalis tahun 2024 tersebut terbagi ke 10.560 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh) orang laki-laki turun 10,01% (sepuluh koma nol satu persen) dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 11.735 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) orang, dan 6.001 (enam ribu satu) orang perempuan turun 12,84% (dua belas koma delapan puluh empat persen) dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 6.885 (enam ribu delapan ratus delapan puluh lima) orang.

Perbandingan jumlah masyarakat yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 tersebut menghasilkan besaran tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,88% (lima koma delapan puluh delapan persen) turun sebesar 1,20% (satu koma dua puluh persen) poin dari tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 yang tercatat sebesar 7,09% (tujuh koma nol sembilan persen). Faktor-faktor pendukung turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis antara lain adanya sejumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri khususnya minyak bumi dan gas dengan direvitalisasi dan dioperasikannya sumur-sumur minyak yang sudah lama tidak beroperasi, sektor perkebunan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, konstruksi dan administrasi pemerintah sebagai hasil proses pengangkatan tenaga non Aparatur Sipil Negara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tabel 2.3. Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,03	5,88

Sebagai upaya mendukung pencapaian target menurunnya pengangguran terbuka dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan 4 (empat) kebijakan strategis yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan penempatan tenaga kerja, meningkatkan hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan kemandirian transmigrasi yang didukung oleh 6 (enam) program yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Diantara 6 (enam) program tersebut 3 (tiga) diantaranya merupakan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.

Perkembangan keadaan dan situasi terhadap perubahan arah kebijakan penganggaran serta mempertimbangkan kondisi realisasi pendapatan tahun berjalan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis diperlukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, yakni terkait pemenuhan alokasi gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari hasil rekonsiliasi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis serta telah dilakukan pergeseran kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024, pemenuhan kekurangan honorarium tenaga non Aparatur Sipil Negara, penyelesaian hutang pihak ketiga atas belanja kegiatan tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi kantor serta hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *readiness criteria* Dana Alokasi Khusus 2024 dan perencanaan untuk pembangunan tahun 2024 dengan tetap memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi program strategis Pemerintah Kabupaten Bengkalis guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Karenanya dalam rangka menyikapi hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis juga mengalami perubahan anggaran dalam uraian akun belanja yang disampaikan dalam dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2024 disusun berdasarkan acuan dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen anggaran yang ada serta

hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Anggaran yang semula Rp. 24.799.810.635,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 mengalami penyesuaian sebesar Rp. -2.270.907.752,- (minus dua milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 22.528.902.883,- (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 17.224.750.674,- tujuh belas milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setara dengan 76,46 % (tujuh puluh enam koma empat puluh enam persen) bagi pelaksanaan 7 (tujuh) program 16 (enam belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Penyerapan anggaran yang kurang optimal dikarenakan memperhatikan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga beberapa sub kegiatan mengalami rasionalisasi atau dihapuskan dari daftar pelaksanaan kegiatan serta adanya tunda bayar pada beberapa kegiatan fisik dan pengadaan barang jasa lainnya.

Perubahan Anggaran Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis terjadi pada 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, yakni:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;

- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD;
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
 - 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatannya antara lain: Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan, Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;
 - 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatannya antara lain: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
 - 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - 2.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan sub kegiatannya antara lain: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro;
 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga;
 - 3.1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan sub kegiatannya: Proses pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dan Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota;

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

4.1. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran;

5. Program Hubungan Industrial

5.1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan antara lain: Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota, Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;

6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

6.1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota sub kegiatan pelatihan transmigrasi.

Lebih jelas Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap ABPD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.							Indeks Reformasi Birokrasi		63	63								
1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Predikat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB								
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							24.564.584.479	22.397.226.908	-	2.167.357.571	-8,82		
	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							24.564.584.479	22.397.226.908	-	2.167.357.571	-8,82		
	2	07	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	17.300.213.542	12.422.167.353	-	4.878.046.189	-28,20		
	2	07	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			100%	100%	226.846.848	262.459.728		35.612.880	15,70	
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	2 dokumen	2 dokumen	176.193.838	194.202.718		18.008.880	10,22	penyesuaian anggaran
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	4 laporan	4 laporan	50.653.010	68.257.010		17.604.000	34,75	penyesuaian anggaran
	2	07	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan			100%	100%	12.541.262.709	7.766.883.830	-	4.774.378.879	-38,07	

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting
	1	2	3	4	5						8	9					
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	50 orang	49 orang	12.541.262.709	7.766.883.830	- 4.774.378.879	-38,07	Digeser Rp.2.217.000.000 ke BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan sektor perkebunan dan dikurangi/dirasio sebesar Rp.2.557.378.870
	2	07	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100%	100%	691.200.000	672.000.000	- 19.200.000	-2,78	
					02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	1 dokumen	1 dokumen	691.200.000	672.000.000	- 19.200.000	-2,78	penyesuaian anggaran
	2	07	01	2	05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat			100%	100%	43.930.000	-	- 43.930.000	-100,00	
					11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	5 orang	0 orang	43.930.000	-	- 43.930.000	-100,00	sub kegiatan dirasionalisasi
	2	07	01	2	06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	1.712.471.328	1.602.267.271	- 110.204.057	-6,44	
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	2 paket	2 paket	30.763.471	30.763.471	-	0,00	
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	2 paket	2 paket	95.989.976	95.989.976	-	0,00	

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap ABPD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting
	1	2	3	4						5	6					
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	2 paket	1 paket	302.520.000	163.500.000	- 139.020.000	-45,95	rasionalisasi pada akun belanja makan minum security, anggaran digeser ke sub kegiatan pengadaan sarana prasarana dan
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	2 paket	2 paket	121.666.663	101.353.303	- 20.313.360	-16,70	anggaran akun belanja spanduk/baliho digeser ke spped rutin
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	1 dokumen	1 dokumen	17.024.600	13.050.000	- 3.974.600	-23,35	penyesuaian anggaran
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	400 laporan	500 laporan	844.206.618	902.410.521	58.203.903	6,89	penyesuaian anggaran
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	1 dokumen	1 dokumen	300.300.000	295.200.000	- 5.100.000	-1,70	penyesuaian anggaran

Tujuan / Sasaran / Strategi	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting		
	1	2	3	4						8	9							
	2	07	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			100%	100%	155.084.617	274.296.500	119.211.883	76,87		
					05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	65 unit	65 unit	84.330.000	84.330.000	-	0,00		
					10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	30 unit	34 unit	70.754.617	189.966.500	119.211.883	168,49	penyesuaian anggaran	
	2	07	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan			100%	100%	602.670.166	584.632.150	-	18.038.016	-2,99	
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	800 laporan	800 laporan	237.899.650	237.899.650	-	0,00		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	12 laporan	12 laporan	335.539.476	316.532.500	-	19.006.976	-5,66	penyesuaian anggaran
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	1 laporan	1 laporan	29.231.040	30.200.000	968.960	3,31	penambahan JKK JKM Non ASN dri sppd rutin	
	2	07	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			100%	100%	1.326.747.874	1.259.627.874	-	67.120.000	-5,06	
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	13 unit	13 unit	310.730.000	243.610.000	-	67.120.000	-21,60	penyesuaian anggaran

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting		
											Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	40 unit	40 unit	48.820.000	48.820.000	-	0,00		
						09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	6 unit	6 unit	648.647.874	648.647.874	-	0,00		
						10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	11 unit	11 unit	318.550.000	318.550.000	-	0,00		
Meningkatkan Kontribusi Non Migas Terhadap Perekonomian Daerah																			
2.1. Menurunkan Tingkat Pengangguran								Tingkat Pengangguran Terbuka				8,54%	7,03%						
	2	07	02				Program Perencanaan Tenaga Kerja *** Program Unggulan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Ketersediaan Data Perusahaan, Lembaga Pelatihan dan Ketenaga Kerjaan			90%	90%	279.082.131	217.498.719	-	61.583.412	-22,07	
	2	07	02	2	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja			35%	35%	279.082.131	217.498.719	-	61.583.412	-22,07	
						01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	1 dokumen	1 dokumen	154.541.061	133.798.698	-	20.742.363	-13,42	penyesuaian anggaran
						02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	10 orang	10 orang	124.541.070	83.700.021	-	40.841.049	-32,79	penyesuaian anggaran

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting
	1	2	3	4	5						8	9					
	2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja *** Program Unggulan	Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kerja Dengan Sertifikasi Kompetensi			25%	25%	1.576.952.462	1.353.465.794	- 223.486.668	-14,17	
	2	07	03	2	01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			100%	100%	1.372.677.153	1.149.190.485	- 223.486.668	-16,28	
					01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	95 orang	85 orang	1.124.011.306	1.034.011.306	- 90.000.000	-8,01	
					02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun N	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	4 lembaga	4 lembaga	106.547.662	106.547.662	-	0,00	
					03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	25 unit	0 unit	142.118.185	8.631.517	- 133.486.668	-93,93	sub kegiatan dirasionalisasi
	2	07	03	2	02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Lembaga Pelatihan Swasta Yang Terbina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina			10 Lembaga	10 Lembaga	105.885.036	105.885.036	-	0	
					01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	10 lembaga	10 lembaga	105.885.036	105.885.036	-	0,00	
	2	07	03	2	04	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas			5 perusahaan	5 perusahaan	98.390.273	98.390.273	-	0	

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting	
	1	2	3	4	5						6	7						8
					01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	5 perusahaan	5 perusahaan	98.390.273	98.390.273	-	0,00		
	2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan			85%	85%	283.123.635	236.873.175	-	46.250.460	-16,34	
	2	07	04	2	03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			100%	100%	236.873.175	236.873.175	-	0		
					02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	5000 orang	2000 orang	98.712.306	98.712.306	-	0,00		
					03	Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	100 orang	100 orang	138.160.869	138.160.869	-	0,00		
	2	07	04	2	04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah PMI Yang Dilindungi			25 Orang	0 Orang	46.250.460	-	-	46.250.460	-100	
					02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	25 orang	0 orang	46.250.460	-	-	46.250.460	-100,00	sub kegiatan dirasionaliasi
	2	07	05			Program Hubungan Industrial	Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan			95%	95%	5.125.212.709	8.167.221.867	3.042.009.158	59,35		

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting
	1	2	3	4	5						6	7					
	2	07	05	2	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) bagi perusahaan di Kabupaten Bengkulu; 2. Terlaksananya Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi perusahaan	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	419.861.753	419.861.753	-	0	
					01	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP	Jumlah Perusahaan yang melakukan Pengesahan peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	20 perusahaan	20 perusahaan	78.959.286	78.959.286	-	0,00	
					02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	5 perusahaan	5 perusahaan	62.719.260	62.719.260	-	0,00	
					03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	1 laporan	1 laporan	278.183.207	278.183.207	-	0,00	
	2	07	05	2	02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	4.705.350.956	7.747.360.114	3.042.009.158	64,65	

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	25 perkara	25 perkara	139.667.574	96.714.186	-42.953.388	-30,75	rasionalisasi/ pengurangan anggaran
					02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	25 perkara	25 perkara	139.667.297	139.667.297	-	0,00	
					03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konferderasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terseleenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konferdasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	20 asosiasi	20 asosiasi	80.703.294	80.703.294	-	0,00	
					04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	1 lembaga	1 lembaga	197.238.333	197.238.333	-	0,00	
					05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	24000 orang	34000 orang	4.148.074.458	7.233.037.004	3.084.962.546	74,37	penambahan JKK JKM Non ASN (pekerja rentan): 2 bln*24.000 org * 16.800 = Rp.806.400.000 penambahan/pengeluaran dari akun gaji tpp utk BPJS DBH Sawit utk 10.000 org : Rp.2.217.000.000

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting				
	1	2	3	4	5						6	7						8	9	10	11
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG															
	3	32	02									235.226.156	131.675.975	-	103.550.181	-44,02					
	3	32	02									235.226.156	131.675.975	-	103.550.181	-44,02					
	3	32	02			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi *** Program Unggulan	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi				100%	100%		101.500.583	101.500.583	-	0			
	3	32	02	2	01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				100%	100%		101.500.583	101.500.583	-	0			
					04	Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	DAU-DBH	1 dokumen	1 dokumen	101.500.583	101.500.583	-	0,00					
	3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi				100%	22,57%		133.725.573	30.175.392	-	103.550.181	-77,43		
	3	32	03	2	01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penataan persebaran penduduk dari 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota				100%	22,57%		133.725.573	30.175.392	-	103.550.181	-77,43		
					06	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	DAU-DBH	20 orang	-	133.725.573	30.175.392	-	103.550.181	-77,43	sub kegiatan dirasionalisasi			
												24.799.810.635	22.528.902.883	-	2.270.907.752	-9,16					

2.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Upaya pencapaian target kinerja menurunnya pengangguran terbuka tidak terlepas dari dukungan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang 3 (tiga) diantaranya terdapat program unggulan yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi. Sasaran strategis menurunnya pengangguran terbuka memperoleh total dukungan pendanaan sebesar Rp. 10.106.735.530,- (sepuluh milyar seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 6.720.926.487,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setara dengan 66,50% (enam puluh enam koma lima puluh persen).

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah (target BB) yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.422.167.353,- (dua belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) Anggaran tersebut dialokasikan ke belanja pegawai sebesar Rp. 7.766.883.830,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan Rp. 4.655.283.523,- (empat milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) belanja rutin sekretariat. Serapan anggaran pada program tersebut sebesar 10.503.824.187,- (sepuluh milyar lima ratus tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setara dengan 84,56% (delapan puluh empat koma lima puluh enam persen).

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Program Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Program	Kinerja (%)		
		Target	Hasil	Capaian
1	2	3	4	5
Menurunnya Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,03	5,88	83,64
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	90	45	50,00
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	25	100	92,22
	Program Penempatan Tenaga Kerja	85	100	62,73
	Program Hubungan Industrial	95	100	76,77
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100	100	100,00
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100	0	0,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	92,39

Tabel 2.6. Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023-2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Program	Kinerja (%)					
		2023			2024		
		Target	Hasil	Capaian	Target	Hasil	Capaian
1	2	6	7	8	9	10	11
Menurunnya Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,44	7,09	83,99	7,03	5,88	83,64
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	87	70	80,46	90	45	50,00
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	20	15	75,00	25	100,00	92,22
	Program Penempatan Tenaga Kerja	83	65	78,31	85	100,00	62,73
	Program Hubungan Industrial	93	80	86,02	95	100,00	76,77
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100	75,50	75,50	100	100,00	100,00
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100	100	100,00	100	0	0,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100,00	BB	BB	100,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100,00	100	100,00	92,39

Secara umum terdapat 4 program dengan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan kinerja terjadi karena beberapa faktor antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini jumlah dan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
2. Meskipun kegiatan *job fair*/bursa kerja telah tuntas dilaksanakan namun jumlah serapan tenaga kerja yang diharapkan dari kegiatan tersebut belum optimal dikarenakan keahlian calon tenaga kerja tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh penyedia pekerjaan;
3. Beberapa Peraturan Perusahaan belum habis masa berlakunya (2 tahun), masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban membuat peraturan perusahaan, disamping itu terdapat sejumlah perusahaan yang telah membuat peraturan perusahaan namun belum secara periodik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun melakukan pembaharuan;
4. Perkara yang dilaporkan dan ditangani oleh Mediator Hubungan Industrial bersifat dinamis mengikuti keadaan dan kondisi perkara yang dihadapi oleh perusahaan dan karyawannya;
5. Memperhatikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga beberapa kegiatan mengalami rasionalisasi atau penghapusan dari rencana kerja.

Langkah-langkah pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan target capaian kinerja program antara lain adalah:

1. Melakukan telaah dan kaji ulang terkait target capaian sub kegiatan, kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja periode selanjutnya dengan memperhatikan kondisi *real* dan peraturan serta kebijakan yang berlaku;

2. Melaksanakan sosialisasi terkait prosedur standar proses mendapatkan Kartu Pencari Kerja (AK1) baik secara langsung kepada masyarakat yang melaksanakan proses mendapatkan Kartu Pencari Kerja (AK1) maupun melalui media elektronik dan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk menjadikan Kartu Pencari Kerja (AK1) sebagai syarat melamar pekerjaan;
3. Melakukan usulan penambahan jumlah Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dengan memperhatikan Analisis Jabatan yang telah disusun;
4. Evaluasi dan pengendalian internal terkait kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program.

Efisiensi dan efektivitas kerja merupakan kunci utama dalam mencapai hasil yang maksimal dari sebuah target rencana kerja. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai hasil maksimal dengan meminimalkan penggunaan sumber daya. Ini melibatkan optimalisasi proses dan metode kerja guna mengurangi pemborosan dalam berbagai bentuk. Berbeda dengan efisiensi yang berpusat pada proses, efektivitas berorientasi pada hasil dan tujuan. Efektivitas adalah pemilihan teknologi/metode/cara yang tepat untuk mengolah sumber daya untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Ini adalah kapabilitas suatu sistem atau entitas untuk mencapai sasaran atau *outcome* yang telah ditetapkan secara akurat dan tepat.

Anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dukungan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis target jangka menengah tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Diharapkan ke depan efektivitas anggaran akan lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam rangka memperoleh kesempatan peluang kerja yang seluas-luasnya dengan jenis kesempatan kerja yang lebih beragam.

Tabel 2.7. Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Program	Kinerja (%)			Anggaran			Efisiensi
		Target	Hasil	Capaian	Pagu	Serapan	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,03	5,88	83,64	10.106.735.530	6.720.926.487	66,50	33,50
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	90	45	50,00	217.498.719	82.019.461	37,71	62,29
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	25	100	92,22	1.353.465.794	1.291.899.442	95,45	4,55
	Program Penempatan Tenaga Kerja	85	100	62,73	236.873.175	232.027.306	97,95	2,05
	Program Hubungan Industrial	95	100	76,77	8.167.221.867	4.995.801.389	61,17	38,83
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100	100	100,00	101.500.583	92.187.883	90,82	9,18
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100	0	0,00	30.175.392	26.991.006	89,45	10,55
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100	12.422.167.353	10.503.824.187	84,56	15,44
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	92,39	12.422.167.353	10.503.824.187	84,56	15,44

Tabel 2.8. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

No.	Uraian	APBD Murni	APBD-P	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program	7	7	7	100
2.	Kegiatan	18	16	16	100
3.	Sub Kegiatan	41	39	39	100
4.	Total Anggaran (Rp)	24.799.810.635	22.528.902.883	17.224.750.674	76,46
5.	Belanja Pegawai (Rp)	12.541.262.709	7.766.883.830	6.967.054.908	89,70
6.	Belanja Operasi (Rp)	12.258.547.926	14.762.019.053	10.257.695.766	69,49

Tabel 2.9. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
 PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2024
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 TRIWULAN 4

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 9

No.	Sasaran RPKD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung						
					6		7			8		9		10		11				12			13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		61.827.885.340,00	-	21.700.771.100,00		12.422.182.885,00		2.071.372.086,00		2.607.255.216,00		3.524.551.951,00		2.300.644.934,00		10.503.824.187,00		32.204.595.287,00		52,09	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		867.960.000,00	-	389.095.900,00		-	0	31.237.010,00	0	52.470.755,00	0	75.827.200,00	0	80.073.883,00		239.608.848,00		628.704.748,00		72,43					
		01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3	194.914.500,00	2	159.977.838,00	1	9.280.000,00	0	43.350.755,00	0	75.827.200,00	1	52.173.883,00	2,00	180.631.838,00		374.646.338,00		-					
		01.2.01.0006.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	7	195.081.400,00	4	50.653.010,00	2	21.957.010,00	1	9.120.000,00	0	0,00	1	27.900.000,00	4,00	58.977.010,00	11,00	254.058.410,00	61,11	29,27					
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		38.856.771.026,00	-	13.053.044.294,00		-	0	1.305.849.801,00	0	1.748.689,827,00	0	2.282.087,456,00	0	1.630.427,824,00		6.967.054.908,00		20.020.099.202,00		51,52					
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600%	38.856.771.026,00	24	13.053.044.294,00	50	7.766.883.209,00	0	1.305.849.801,00	0	1.748.689,827,00	0	2.282.087,456,00	41	1.630.427,824,00	41,00	6.967.054.908,00	65,00	20.020.099.202,00	10,83	51,52				
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.933.600.000,00	-	1.376.000.000,00		-	0	168.000.000,00	0	112.000.000,00	0	224.000.000,00	0	112.000.000,00		616.000.000,00		1.992.000.000,00		50,64					

Print By: SIMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RPKD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x100%	(16)											
		01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	214 Orang 3.933.600.000,00	37 1.376.000.000,00	1 Dokumen 691.200.000,00	0- 168.000.000,00	0- 112.000.000,00	0- 224.000.000,00	1 Dokumen 112.000.000,00	1,00 616.000.000,00	38,00 1.992.000.000,00	17,76 50,64												
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		69.762.000,00	-	-	0	0	0	0	-	-	-												
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.247.078.400,00	-	3.182.715.092,00	-	0	277.855.098,00	0 372.271.658,00	0 480.423.163,00	0 223.719.621,00	- 1.354.269.540,00	- 4.536.994.632,00	- 55,01										
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	145 Jenis 179.400.000,00	13 59.713.800,00	2 Paket 30.763.471,00	0- 6.041.996,00	0- 9.449.974,00	0- 12.369.120,00	2 Paket 2.902.381,00	2,00 30.763.471,00	15,00 90.477.271,00	10,34 50,43												
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Bulan 833.706.000,00	15 322.522.700,00	2 Paket 96.989.976,00	0- 18.149.417,00	0- 27.815.554,00	0- 40.059.794,00	2 Paket 9.036.381,00	2,00 96.061.146,00	17,00 417.583.846,00	23,61 50,09												
		01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Bulan 1.280.920.000,00	46 537.550.000,00	2 Paket 302.520.000,00	0- 9.050.000,00	0- 57.950.000,00	0- 62.950.000,00	2 Paket 15.000.000,00	2,00 144.950.000,00	48,00 682.500.000,00	66,67 53,28												
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	116 Jenis 799.362.800,00	21 132.755.600,00	2 Paket 121.666.663,00	0- 7.700.491,00	0- 19.086.337,00	0- 26.793.809,00	2 Paket 11.223.656,00	2,00 64.804.293,00	23,00 197.559.893,00	19,83 24,71												
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 Media 119.819.600,00	4 17.574.600,00	1 Dokumen 13.050.000,00	0 0,00	0- 3.600.000,00	0- 1.350.000,00	1 Dokumen 450.000,00	1,00 5.400.000,00	5,00 22.974.600,00	27,78 19,17												
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan 3.340.670.000,00	259 1.547.998.392,00	400 Laporan 804.676.061,00	100 Laporan 163.713.194,00	100 Laporan 205.569.793,00	100 Laporan 239.300.440,00	100 Laporan 135.507.203,00	400,00 744.090.630,00	659,00 2.292.089.022,00	43,93 68,61												
		01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	146 Orang 1.693.200.000,00	14 564.600.000,00	1 Dokumen 300.300.000,00	0- 73.200.000,00	0- 48.800.000,00	0- 97.600.000,00	1 Dokumen 49.600.000,00	1,00 269.200.000,00	15,00 833.800.000,00	10,27 49,24												
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		232.602.000,00	-	313.244.050,00	-	0	0,00	0 0,00	0 1.300.000,00	- 1.300.000,00	- 314.544.050,00	- 100,00											
		01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	170 Unit 171.402.000,00	78 127.645.050,00	35 Unit 84.330.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35 Unit 0,00	35,00 -	113,00 127.645.050,00	66,47 74,47												

Print By eMDONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	170 Jenis	61.200.000,00	29	185.599.000,00	17 Unit	70.754.617,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 Unit	1.300.000,00	5,00	1.300.000,00	34,00	186.899.000,00	20,00	100,00	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.403.091.634,00	-	1.006.438.568,00		-	0	122.883.103,00	0	102.016.249,00	0	148.735.165,00	0	92.098.066,00	-	465.732.583,00	1.472.171.151,00	-	43,26		
		01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90 Orang; 15000 Lembar	1.220.563.200,00	816	447.095.120,00	800 Laporan	237.899.650,00	200 Laporan	58.488.000,00	200 Laporan	42.232.000,00	200 Laporan	80.612.000,00	200 Laporan	38.344.000,00	800,00	219.676.000,00	1.616,00	666.771.120,00	100,00	54,63	
		01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Bulan	2.067.328.434,00	24	510.955.608,00	12 Laporan	335.539.476,00	3 Laporan	56.251.423,00	3 Laporan	54.102.409,00	3 Laporan	61.723.165,00	3 Laporan	46.417.666,00	12,00	218.494.663,00	36,00	729.450.271,00	50,00	35,28	
		01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Orang	115.200.000,00	2	48.387.840,00	1 Laporan	29.231.040,00	0-	8.143.680,00	0-	5.681.840,00	0-	6.400.000,00	1 Laporan	7.336.400,00	1,00	27.561.920,00	3,00	75.949.760,00	50,00	65,93	
		01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	900.000.000,00	16	358.149.687,00	13 Unit	310.730.000,00	0	0,00	0-	79.492.227,00	13 Unit	80.665.407,00	0-	16.602.800,00	13,00	176.760.434,00	29,00	534.910.121,00	80,56	59,43	
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	200.000.000,00	55	92.898.298,00	40 Unit	48.820.000,00	19 Unit	6.200.000,00	8 Unit	19.500.000,00	5 Unit	11.150.000,00	8 Unit	9.000.000,00	40,00	45.850.000,00	95,00	138.748.298,00	100,00	69,37	
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit; 300 Orang	3.986.812.280,00	18	1.290.630.000,00	6 Unit	648.647.874,00	0-	159.347.074,00	0-	120.814.500,00	0-	221.663.560,00	6 Unit	100.422.740,00	6,00	602.247.874,00	24,00	1.892.877.874,00	40,00	47,48	
		01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	1.199.970.000,00	15	638.555.211,00	3 Unit	318.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 Unit	35.000.000,00	3,00	35.000.000,00	18,00	673.555.211,00	60,00	56,13	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											16,38	14,47	36,35	19,26	53,49	23,18	95,65	15,09	95,65	70,54			42,96	50,49	
Prediktor kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Rendah	

Print By : @MCNVEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RPKD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		00.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			1.438.875.000,00	-	343.686.935,00		279.082.131,00		0,00		43.253.806,00		0,00		38.765.655,00		-	82.019.461,00		-	425.706.396,00		-	29,59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		00.02.2.01.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja			1.438.875.000,00	-	343.686.935,00		-	0	0,00	0	43.253.806,00	0	0,00	0	38.765.655,00	-	-	82.019.461,00		-	425.706.396,00		-	29,59	
		00.02.2.01.00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	6 Dokumen	1.438.875.000,00	2	343.686.935,00	1 Dokumen	154.541.061,00	0-	0,00	0-	20.426.643,00	0	0,00	1 Dokumen	38.765.655,00	1,00	59.192.298,00	3,00	402.879.233,00	50,00	402.879.233,00		28,00		
		00.02.2.01.00	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		-	-	-	20 Orang	124.541.070,00	0-	0,00	0-	22.827.163,00	0	0,00	0-	0,00	-	-	22.827.163,00		-	22.827.163,00		-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	23,34	15,77	0,00	0,00	50,00	12,54	65,84	28,32			41,33	14,00				
Prediktor Kinerja Program											TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	Sedang	TARGET			TARGET	TARGET			
Meningkatnya Daya Saing Dan Produktivitas Tenaga Kerja	00.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				7.276.645.102,00	-	4.199.386.223,00		1.434.834.277,00		66.288.200,00		101.452.400,00		81.701.600,00		1.033.841.742,00	-	-	1.283.283.942,00		-	5.482.670.165,00		-	75,35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		00.03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			6.477.836.020,00	-	3.893.871.723,00		-	0	33.632.900,00	0	43.266.000,00	0	11.550.400,00	0	1.014.611.742,00	-	-	1.103.061.042,00		-	4.996.932.765,00		-	77,14	
		00.03.2.01.00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1500 Orang	6.477.836.020,00	384	3.791.147.033,00	95 Orang	1.124.011.306,00	0-	18.185.000,00	0-	14.770.000,00	0	0,00	85 Orang	992.900.931,00	85,00	1.025.855.931,00	469,00	4.817.002.964,00	31,27	4.817.002.964,00		31,27	74,36	
		00.03.2.01.00	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		-	4	102.724.690,00	4 Lembaga	106.547.662,00	0-	15.447.900,00	2 Lembaga	28.496.000,00	0-	11.550.400,00	2 Lembaga	21.710.811,00	4,00	77.205.111,00		-	179.929.801,00		-	-		
		00.03.2.02.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.			798.809.082,00	-	210.813.800,00		-	0	17.067.900,00	0	36.914.500,00	0	35.415.800,00	0	12.880.000,00	-	-	102.278.200,00		-	313.092.000,00		-	39,19	
		00.03.2.02.00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	102 LPK	798.809.082,00	23	210.813.800,00	10 Lembaga	105.895.036,00	3 Lembaga	17.067.900,00	4 Lembaga	36.914.500,00	3 Lembaga	35.415.800,00	1 Lembaga	12.880.000,00	11,00	102.278.200,00	34,00	313.092.000,00	33,33	313.092.000,00		33,33	39,19	

Print By eMONEY - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung						
					6		7			8		9		10		11				12			13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
		00.032.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			-	-	94.700.700,00			-	0	15,587,400.00	0	21,271,900.00	0	34,735,400.00	0	6,350,000.00	-	77.944.700,00			172.645.400,00	-	-		
		00.032.04.001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		-	4	94.700.700,00	4	98.390.273,00	0	15,587,400.00	0	21,271,900.00	4	34,735,400.00	0	6,350,000.00	4,00	77.944.700,00			172.645.400,00	-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										12.50	12.02	40.50	21.14	39.50	19.90	100.00	31.83	100.00	84.89			37.45	28.39					
Predikst kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Meningkatnya Pencari Kerja Yang Ditempatkan	00.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			1.480.725.084,00	-	635.920.574,00		236.873.175,00		25,885,469.00		24,518,671.00		132,163,166.00		49,460,000.00	-	232.027.306,00	-	867.947.880,00	-	58,62		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	00.04.2.03	Pengelolaan informasi pasar kerja			1.480.725.084,00	-	635.920.574,00		-		0	25,885,469.00	0	24,518,671.00	0	132,163,166.00	0	49,460,000.00	-	232.027.306,00			867.947.880,00	-	58,62			
	00.04.2.03.002	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kafir Hub)	6 Dokumen	780.833.384,00	6433	361.783.674,00	2000 Orang	98.712.306,00	134 Orang	25,885,469.00	179 Orang	24,518,671.00	1227 Orang	44,881,097.00	950 Orang	0.00	2.490,00	95.285.237,00	8.923,00	457.068.911,00	100,00	58,54					
	00.04.2.03.003	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	240 Peserta	699.891.700,00	140	274.136.900,00	100 Orang	138.160.869,00	0	0.00	0	0.00	0	87.282,069.00	100 Orang	49,460,000.00	100,00	136.742.069,00	240,00	410.878.969,00	100,00	58,71					
	00.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-		-		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										13.64	13.11	20.26	12.42	80.50	54.32	100.00	17.90	100.00	97,75			41,92	58,62					
Predikst kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah					
Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	00.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			2.278.984.166,00	-	7.654.406.840,00		8.105.659.321,00		94,813,560.00		1,356,535,062.00		2,798,114,080.00		746,338,687.00	-	4.995.801.389,00	-	12.650.208.229,00	-	100,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Printed By eMDONEY - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung						
					6		7			8		9		10		11				12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
		00.05.2.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.294.978.000,00	-	6.505.553.500,00		-	0	30.600.000,00	0	66.030.007,00	0	142.876.547,00	0	92.597.827,00	-	332.104.381,00		6.837.657.881,00	-	100,00					
		00.05.2.01.00.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online	165	449.988.000,00	33	171.917.800,00	20	78.959.286,00	5	15.600.000,00	1	10.400.000,00	5	26.394.778,00	1	10.400.000,00	12,00	62.794.778,00	45,00	234.712.578,00	27,27	52,16				
		00.05.2.01.00.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	220	409.990.000,00	21	158.825.000,00	5	62.719.260,00	0-	15.000.000,00	2	10.000.000,00	3	21.266.396,00	1	10.000.000,00	6,00	56.266.396,00	27,00	215.091.396,00	12,27	52,46				
		00.05.2.01.00.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6	435.000.000,00	2	6.174.810.700,00	1	278.183.207,00	0	0,00	0-	45.630.007,00	0-	95.215.373,00	1	72.197.827,00	1,00	213.043.207,00	3,00	6.387.853.907,00	50,00	100,00				
		00.05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		984.006.166,00	-	1.148.853.340,00		-	0	64.213.560,00	0	1.290.505,055,00	0	2.655.237,533,00	0	653.740,860,00	-	4.663.697.008,00		5.812.550.348,00	-	100,00					
		00.05.2.02.00.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-	24	162.083.200,00	25	96.714.186,00	0-	17.005,075,00	0	0,00	6	19.602.537,00	6	0,00	12,00	36.607.612,00		198.690.812,00	-	-					

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RPKD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x100%		(16)
		00.05.2.02.002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasaikan	195 Kasus	676.064.696,00	47	440.404.240,00	25 Perkara	139.667.297,00	2 Perkara	22.424.322,00	0-	13.440.000,00	3 Perkara	42.908.429,00	7 Perkara	0,00	12,00	78.772.751,00	59,00	519.176.991,00	30,26	76,79	
		00.05.2.02.003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-	-	20	80.125.600,00	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	80.703.294,00	0	0,00	1 Asosiasi dan Serikat pekerja	20.239.226,00	0-	22.960.000,00	0-	19.733.548,00	1,00	62.932.774,00	-	143.058.374,00	-	-	
		00.05.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	30 Pertemuan	307.941.470,00	5	466.240.300,00	1 Lembaga	197.238.333,00	0	0,00	0-	52.904.229,00	1 Lembaga	71.610.131,00	0-	66.765.173,00	1,00	191.279.533,00	6,00	657.519.833,00	20,00	100,00	
		00.05.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tertaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-	-	34.000 Orang	7.171.474.458,00	0-	24.784.163,00	0-	1.203.921.600,00	0-	2.498.156,436,00	34000 Orang	567.242.139,00	34.000,00	4.294.104.338,00	-	4.294.104.338,00	-	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11,83	9,71	26,72	15,48	51,50	31,52	98,75	15,16	98,75	71,86			36,49	47,68	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		00.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			599.025.949,00	-	340.764.445,00		101.500.583,00		7.361.359,00		35.854.800,00		48.971.724,00		0,00	-	92.187.883,00	-	432.952.328,00	-	72,28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		00.02.2.01	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi			599.025.949,00	-	340.764.445,00		-	0	7.361.359,00	0	35.854.800,00	0	48.971.724,00	0	0,00	-	92.187.883,00		432.952.328,00	-	72,28	
		00.02.2.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	6 Dokumen	599.025.949,00	2	340.764.445,00	1 Dokumen	101.500.583,00	0-	7.361.359,00	0-	35.854.800,00	0-	48.971.724,00	1 Dokumen	0,00	1,00	92.187.883,00	3,00	432.952.328,00	50,00	72,28	

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung				
								I	II	III	IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7+13	15 = 14/6 x 100%	(16)				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								15.93	7.25	28.78	35.32	92.00	48.25	95.00	0.00	95.00	28.82	36.85	72.28
Predikat kinerja Program								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sedang
	00.03.2.01.		Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		360.000.000,00	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)																	36.85		
Predikat kinerja Program																	Sangat Rendah		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)								11.71	9.42	29.32	19.89	52.83	29.52	89.90	15.42	92.54	74.27	5.71	55.67
Predikat Kinerja OPD								Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja								: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota: * Pendorong : Tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, adanya komitmen dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja * Pendorong : Tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, adanya komitmen dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 3. Program Hubungan Industrial * Pendorong : Tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, adanya komitmen dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja											
Faktor penghambat pencapaian kinerja								: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota: *Penghambat : Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah, karena untuk memenuhi kegiatan yang lebih prioritas dan terjadinya tunda bayar 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja *Penghambat : a./terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan/evaluasi rencana tenaga kerja, b/ dinamika kebijakan mengakibatkan anggaran mengalami pergeseran/perubahan pada APBD-p, c/ Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah 3. Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja * Penghambat : a./ Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah, b/ rasionalisasi anggaran 4. Program Hubungan Industrial * Penghambat : a./ Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah 5. Program Pembangunan Kawasan * Penghambat : rasionalisasi anggaran											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								:											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*)								:											

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung				
								I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

*) Diisi oleh Kepala Bappeda



Disusun,
Bengkalis, - Januari - 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkulu

SALMAN ALFARISI, ST
Pembina
NIP. 19820519 201102 1 001

Dievaluasi,
Bengkalis, - Januari - 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah



RINTO, SE. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19810601 200903 1 002

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Angka pengangguran

Tahun 2024 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 681.884 (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat) orang, 348.949 (tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) orang berjenis kelamin laki-laki dan 332.935 (tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima) orang perempuan. Naik 3,50% (tiga koma lima puluh persen) poin atau setara dengan 23.038 (dua puluh tiga ribu tiga puluh delapan) orang dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 658.846 (enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) orang yang terbagi ke dalam 336.794 (tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) orang laki-laki dan 322.052 (tiga ratus dua puluh dua ribu lima puluh dua) orang perempuan.

Penduduk Usia Kerja (PUK) Kabupaten Bengkalis sebanyak 431.131 (empat ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh satu) orang yang terbagi menjadi 220.416 (dua ratus dua puluh ribu empat ratus enam belas) orang laki-laki dan 210.715 (dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima belas) orang perempuan. Naik 1,37% (satu koma tiga puluh tujuh persen) poin dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 425.312 (empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua belas) orang dengan kategori Penduduk Usia Kerja (PUK) laki-laki sebanyak 217.604 (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus empat) orang dan perempuan sebanyak 207.708 (dua ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan) orang.

Terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 18.788 (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang atau setara

dengan 7,15% (tujuh koma lima belas persen) dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 262.657 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) orang sehingga pada tahun 2024 jumlah angkatan kerja Kabupaten Bengkalis menjadi 281.445 (dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima) orang dengan kategori 187.559 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan) orang laki-laki dan 93.886 (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam) orang perempuan.

Masyarakat yang menganggur di Kabupaten Bengkalis berjumlah 16.561 (enam belas ribu lima ratus enam puluh satu) orang, turun 2.059 (dua ribu lima puluh sembilan) orang atau setara dengan 11,06% (sebelas koma nol enam persen) poin dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 18.620 (delapan belas ribu enam ratus dua puluh) orang. Jumlah masyarakat yang menganggur Kabupaten Bengkalis tahun 2024 tersebut terbagi ke 10.560 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh) orang laki-laki turun 10,01% (sepuluh koma nol satu persen) dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 11.735 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) orang, dan 6.001 (enam ribu satu) orang perempuan turun 12,84% (dua belas koma delapan puluh empat persen) dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 6.885 (enam ribu delapan ratus delapan puluh lima) orang. Perbandingan jumlah masyarakat yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 menghasilkan besaran tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,88% (lima koma delapan puluh delapan persen) turun sebesar 1,20% (satu koma dua puluh persen) poin dari tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 yang tercatat sebesar 7,09% (tujuh koma nol sembilan persen). Faktor-faktor pendukung turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis antara lain adanya sejumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri khususnya minyak bumi dan gas dengan direvitalisasi dan dioperasikannya sumur-sumur minyak yang sudah lama tidak beroperasi, sektor

perkebunan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, konstruksi dan administrasi pemerintah sebagai hasil proses pengangkatan tenaga non Aparatur Sipil Negara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun terjadi penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka namun tantangan terkait ketidaksesuaian ketrampilan maupun kompetensi calon tenaga kerja dengan peluang kerja yang ada masih perlu adanya strategi kebijakan yang tepat sasaran;

2. Rendahnya keterampilan calon tenaga kerja

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bengkalis dalam hal ini adalah kompetensi dan ketrampilan kerja, sistem pendidikan yang belum *link and match* atau masih *output oriented* dan belum *job oriented* masih menjadi isu penting yang harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka meningkatkan penerimaan tenaga kerja lokal pada peluang kesempatan kerja yang ada;

3. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi lapangan pekerjaan sebagai akibat dari ketersediaan informasi pasar kerja yang belum optimal;

4. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang diakibatkan dari lemahnya kedudukan dan pendidikan serta tuntutan ekonomi dari pekerja;

5. Pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang belum optimal dengan indikator yang perlu ditingkatkan antara lain pelayanan bank, promosi dan pelibatan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengembangan pola usaha pokok dan komoditas unggul.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2026

Telaahan terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu yang tercantum pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu 2026 dan selanjutnya menyesuaikan dengan regulasi terbaru terhadap program dan kegiatan untuk tahun 2026;
- b. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan tersebut dengan analisis tahapan-tahapan terdahulu;
- c. Penyajian data dalam bentuk matrik dengan menempatkan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisa;
- d. Memastikan bahwa program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu yang merupakan program lanjutan atau prioritas berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan sudah termuat didalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2026 tetap dilaksanakan;
- e. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu antara Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisa kebutuhan;
- f. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2026 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Tabel 2.10. Review Terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu 2026

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting	
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
1.	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	66,88%	21.415.337.594					66,88%	21.415.337.594	
1.1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	66,88%	21.415.337.594					66,88%	21.415.337.594	
	Urusan Ketenagakerjaan				Masyarakat Kabupaten Bengkulu		21.359.849.736	Urusan Ketenagakerjaan				Masyarakat Kabupaten Bengkulu	21.359.849.736	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Dukungan Pelayanan Adminitrasi Keuangan dan Operasional Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Bidang Urusan Perangkat Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	100%	14.680.465.293	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Dukungan Pelayanan Adminitrasi Keuangan dan Operasional Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Bidang Urusan Perangkat Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	100%	14.680.465.293		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	100%	85.514.015	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	100%	85.514.015		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	2 Dokumen	69.564.435	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	2 Dokumen	69.564.435		

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting	
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	4 Laporan	15.949.580	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	4 Laporan	15.949.580	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	11.484.569.376	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	11.484.569.376	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	52 orang/ bln	11.484.569.376	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	52 orang/ bln	11.484.569.376	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	672.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	672.000.000	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	672.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	672.000.000	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	1.084.062.408	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	1.084.062.408	

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting	
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang- an Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga- n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang- an Bangunan Kantor yang Disediakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Paket	15.376.078	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang- an Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang- an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang- an Bangunan Kantor yang Disediakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Paket	15.376.078	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Paket	40.995.037	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Paket	40.995.037	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Paket	48.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Paket	48.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Paket	44.804.293	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Paket	44.804.293	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	8.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	8.500.000	
		Penyelenggara- an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara- an Rapat Koordinasi dan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	600 Laporan	623.987.000	Penyelenggara- an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggara- an Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggara- an Rapat Koordinasi dan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	600 Laporan	623.987.000	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	302.400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	302.400.000	

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting	
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Yang Tersedia	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	71.588.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Yang Tersedia	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	71.588.000		
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Unit	44.212.000	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Unit	44.212.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Unit	27.376.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Unit	27.376.000		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	482.969.494	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	482.969.494		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	12 Laporan	213.230.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	12 Laporan	213.230.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	12 Laporan	239.539.494	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	12 Laporan	239.539.494		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	30.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	30.200.000		

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan							Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	799.762.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	799.762.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	14 Unit	173.772.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	14 Unit	173.772.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	30 Unit	33.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	30 Unit	33.800.000	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	6 Unit	577.190.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	6 Unit	577.190.000	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Unit	15.000.000	
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	50.156.172	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	50.156.172	
		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	50.156.172	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	50.156.172	

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting	
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	34.206.592	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	34.206.592	
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	10 Orang	15.949.580	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	10 Orang	15.949.580	
		Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Calon Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terlatih	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	1.247.063.660	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Calon Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terlatih	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	1.247.063.660	
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensinya	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Meningkatkan Kompetensinya	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	1.184.403.324	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensinya	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Meningkatkan Kompetensinya	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	1.184.403.324	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100 Orang	1.150.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100 Orang	1.150.000.000	Sub Kegiatan ini menjadi pendukung pelaksanaan arahan tugas prioritas "Penguatan Kerjasama Pelatihan Sertifikasi Tenaga Kerja"
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan dan Produktivitas pada Tahun N	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Lembaga	15.949.580	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan dan Produktivitas pada Tahun N	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Lembaga	15.949.580	
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	4 Unit	18.453.744	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	4 Unit	18.453.744	

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting	
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Dibina	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	44.206.592	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Dibina	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	44.206.592	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	6 Lembaga	44.206.592	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	6 Lembaga	44.206.592	
		Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan Kecil yang Meningkatkan Produktivitasny	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	18.453.744,00	Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan	Persentase Perusahaan Kecil yang Meningkatkan Produktivitasny	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	18.453.744,00	
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Perusahaan	18.453.744	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2 Perusahaan	18.453.744	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	87%	115.949.580	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	87%	115.949.580	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ini menjadi pendukung pelaksanaan arahan tugas prioritas
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	115.949.580	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	115.949.580	"Meningkatkan Koordinasi Dengan Perusahaan Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal".
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2000 Orang	15.949.580	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	2000 Orang	15.949.580	

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting	
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf (Rp)					Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatf (Rp)
		Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	50 Orang	100.000.000	Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	50 Orang	100.000.000	
		Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlindungi	Besaran Kasus Yang Diselesaikan	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	85%	5.266.215.031	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlindungi	Besaran Kasus Yang Diselesaikan	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	85%	5.266.215.031	
		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	20%	232.959.286	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	20%	232.959.286	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	20 Perusahaan	68.559.286	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	20 Perusahaan	68.559.286	
		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perianjian	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	10 Perusahaan	64.800.000,00	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perianjian	Masyarakat Kabupaten Bengkulu	10 Perusahaan	64.800.000,00	

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting	
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	99.600.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	99.600.000	
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten /Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	5.033.255.745	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	100%	5.033.255.745	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	25 Perkara	29.169.146	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	25 Perkara	29.169.146	

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting	
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogo k Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berd ampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berd ampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	26 Perkara	29.169.146	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogo k Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berd ampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogo k Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berd ampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	26 Perkara	29.169.146	
		Penyelenggara an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Fed erasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat	Terselenggaranya a Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	22 Asosiasi	25.949.580	Penyelenggara an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Fed erasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat	Terselenggaranya a Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	22 Asosiasi	25.949.580	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Lembaga	104.213.277	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 Lembaga	104.213.277	

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan							Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	24.000 Orang	4.844.754.596	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja *** Program Unggulan	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	24.000 Orang	4.844.754.596	Sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan "Program Unggulan Daerah Ke-3 : Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat" dengan langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain updating data peserta BPJS ketenagakerjaan, penyiapan Perda pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan, peningkatan peran Badan Usaha untuk menanggung iuran BPJS ketenagakerjaan
	Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian						55.487.858	Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian					55.487.858	
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi □	Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	100%	39.745.495	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi □	Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	100%	39.745.495		
	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terselenggaranya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	100%	39.745.495	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terselenggaranya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	100%	39.745.495		
	Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan	Jumlah Dokumen Usulan Pecadangan Tanah untuk	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	1 Dokumen	39.745.495	Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan	Jumlah Dokumen Usulan Pecadangan Tanah untuk	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	1 Dokumen	39.745.495		

No.	Rancangan Analisa Kebutuhan							Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Outcome Program / Output Kegiatan / Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kec. Rupert, Kab. Bengkulu	100%	15.742.363	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	100%	15.742.363	
		Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kec. Rupert, Kab. Bengkulu	100%	15.742.363	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	100%	15.742.363	
		Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kec. Rupert, Kab. Bengkulu	20 Orang	15.742.363	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	20 Orang	15.742.363	
						TOTAL	21.415.337.594					TOTAL	21.415.337.594	

2.5. Penelahaan Terhadap Usulan Permasalahan Masyarakat

Beberapa kegiatan diusulkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan ketrampilan masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Bengkalis selain juga untuk meningkatkan ketrampilan di sektor industri kecil skala rumah tangga.

Tabel 2.11. Usulan Jenis Pelatihan, Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 Berdasarkan Skala Prioritas

No.	Usulan Jenis Pelatihan	Lokasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4
1	Pelatihan Welder	Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga / Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi/ Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

=====

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kondisi ekonomi global saat ini tengah mengoptimalkan peran ekonomi digital dalam berbagai aspek. Pasca pandemi Covid-19 beberapa tahun yang lalu seakan menjadi pertanda awal merebaknya dan “memaksa” semua aktivitas ekonomi menggunakan digitalisasi. Fenomena pandemi Covid-19 telah merombak struktur ekonomi dan ketenagakerjaan di berbagai dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini sebenarnya menjadi peluang dalam memacu pertumbuhan ekonomi, namun perlu diperhatikan kualitas tenaga kerjanya. Era digitalisasi ini membutuhkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, unggul dan adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi. Sementara itu penduduk bekerja Indonesia hingga saat ini masih didominasi pekerja yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah.

Rancangan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang sangat tinggi membutuhkan dukungan dan peran serta pemerintah dalam meningkatkan *capital investment*. Peran investasi sangatlah penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah, terutama investasi asing. Namun demikian investasi asing akan sangat bergantung pada kondisi daya saing Indonesia terhadap beberapa negara lain. Berdasarkan *World Talent Ranking 2024* kualitas sumber daya manusia Indonesia masih cukup tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia (Sumber: *International Institute for Management Development, 2024*). Rendahnya kualitas tenaga kerja menjadi salah satu penyebab produktivitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia tertinggal. Dalam konteks persaingan global, kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat dalam mendukung proses pembangunan nasional yang berdaya saing. Dengan demikian pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat

urgent untuk terus ditingkatkan sehingga memiliki keunggulan dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi sangat penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global, namun lebih penting lagi upaya peningkatan produktivitas tenaga kerjanya. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, peningkatan produktivitas tenaga kerja berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Penataan pembangunan tenaga kerja di masa mendatang harus memiliki perencanaan yang baik dan berbasis data. Sehingga target-target capaian dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi kekayaan alam perlu terus didorong dengan melibatkan berbagai wilayah disekitarnya secara bersama-sama, sehingga tercipta sinergitas positif yang akan mempercepat kemajuan dan pencapaian kesejahteraan bersama. Wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Namun jika persediaan tenaga kerja di wilayah tersebut tidak memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, maka membutuhkan dukungan tenaga kerja dari wilayah lain disekitarnya. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang pesat juga dapat merambat ke wilayah-wilayah sekitarnya membentuk suatu aglomerasi ekonomi. Diharapkan, kemunculan aglomerasi wilayah yang menopang kemajuan pembangunan dapat tercipta lebih banyak, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan dan perimbangan penduduk di berbagai pulau di Indonesia. Hingga saat ini provinsi-provinsi di wilayah Timur Indonesia memiliki persentase penduduk yang relatif kecil sementara luas wilayahnya sangat besar. Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni oleh sekitar 56% (lima puluh enam persen) penduduk Indonesia.

Aspek ketenagakerjaan setidaknya tercakup dalam dua misi pembangunan nasional di masa depan, yaitu transformasi sosial dan transformasi ekonomi. Dalam transformasi sosial memiliki tiga arah tujuan pembangunan yang mencakup indikator kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif. Satu indikator dalam transformasi ekonomi yang memiliki kaitan erat dengan ketenagakerjaan adalah indikator ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan produktivitas ekonomi. Setidaknya terdapat empat arah tujuan pembangunan di masa mendatang yang berkaitan dengan pembangunan ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab yang sangat berat dalam proses pembangunan nasional. Bidang ketenagakerjaan menjadi penerima estafet dari proses pendidik sumber daya manusia yang diampu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kementerian Ketenagakerjaan selanjutnya diberi tanggung jawab untuk menciptakan pasar kerja yang kondusif. Sementara, dari sisi kebutuhan tenaga kerja merupakan ranah dari pembangunan ekonomi. Tenaga kerja yang dibutuhkan tentu berkaitan dengan banyak hal, termasuk negosiasi dalam investasi pembangunan ekonomi.

Tantangan ketenagakerjaan semakin berat mengingat pertumbuhan penduduk usia lanjut yang diperkirakan akan semakin meningkat. Penduduk lanjut usia di masa mendatang akan tetap produktif pada masa tuanya dan diperkirakan derajat kesehatannya semakin membaik dibandingkan lanjut usia pada generasi sebelumnya. Tantangan serius yang akan dihadapi dalam pembangunan tenaga kerja di masa mendatang adalah kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, produktivitas yang masih rendah, ketimpangan pendapatan dan disparitas antar wilayah yang belum merata, serta pergeseran ekonomi global yang mengakibatkan kerentanan perdagangan dan keuangan di tingkat global dan regional.

Arah pembangunan ekonomi yang mengalami perubahan dan percepatan didukung dengan perkembangan teknologi digital serta otomatisasi membutuhkan penyesuaian strategi dalam pembangunan ketenagakerjaan di masa mendatang. Pembangunan ketenagakerjaan di masa depan akan mencakup isu-isu yang meliputi:

1. Kompetensi Tenaga Kerja Yang Belum Optimal

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pembangunan dan menjadi syarat kemajuan sebuah bangsa. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia telah menjadi persaingan di tingkat global dengan berbagai variasi keunggulan, seperti teknologi, sains, arsitektur, informatika, genetika dan lain sebagainya. Namun, terkadang pemanfaatan sumber daya manusia seringkali tidak optimal bahkan keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan keahlian seakan disia-siakan. Kompetensi dan keahlian sumber daya manusia yang belum optimal bisa dihindari jika pemerintah memberikan perhatian melalui perencanaan yang baik dan berkesinambungan antara rancangan pendidikan, potensi ekonomi, pengembangan wilayah di bawah naungan rancangan pembangunan nasional jangka panjang. Tren persentase meningkat pada jabatan menengah dan rendah pada tenaga kerja berpendidikan tinggi merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebocoran kompetensi akibat tidak optimalnya perencanaan pembangunan. Tren meningkat pada jabatan rendah dan menengah ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jenjang pendidikan tidak diantisipasi dengan ketersediaan lapangan kerja yang layak untuk level pendidikan tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengakibatkan demotivasi sumber daya manusia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ketika seseorang memutuskan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, pasti memiliki ekspektasi dan harapan akan memudahkan mendapat

pekerjaan yang layak dan jabatan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Jika kenyataan yang terjadi justru mereka bekerja hanya mengandalkan fisik dan mengerjakan jenis jabatan yang sama dengan orang yang berpendidikan rendah, di mana letak keunggulan dan kelebihan mereka yang berpendidikan tinggi? Sementara biaya yang telah dikeluarkan selama menempuh pendidikan tinggi dan hilangnya waktu untuk bekerja selama menempuh pendidikan akan menjadi bagian yang hendaknya diperhitungkan dalam perancangan pembangunan ketenagakerjaan. Kegagalan dalam penciptaan lapangan kerja yang layak untuk sumber daya manusia berpendidikan tinggi juga berakibat keluarnya mereka dari angkatan kerja. Tren sumber daya manusia berpendidikan tinggi dan memilih menjadi bukan angkatan kerja mengalami peningkatan. Keluarnya tenaga kerja terdidik dari angkatan kerja akan memperlambat kemajuan bangsa dalam kancah pembangunan ekonomi global. Apalagi diperburuk dengan keterlibatan mereka dalam pembangunan ekonomi yang hanya menempati posisi jabatan sebagai tenaga kerja kasar yang lebih mengandalkan ketahanan fisik daripada kerja yang mengandalkan keahlian dan kompetensi tinggi;

2. Daya Saing dan Produktivitas

Merujuk pada Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index*), posisi Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di tingkat ASEAN. Faktor penting yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan daya saing Indonesia adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, selain pemerataan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang belum merata di berbagai wilayah. Dalam pendekatan makro, produktivitas berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan *output* yang dihasilkan tenaga kerja. Pada pendekatan mikro, produktivitas berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan peningkatan produktivitas diharapkan setiap pekerja akan mampu meningkatkan

kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidupnya. Produktivitas tenaga kerja tidak bisa hanya dipandang dari sisi kualitas dan kompetensi tenaga kerja semata. Permasalahan ketersediaan pekerjaan menjadi faktor utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. Gambaran penyerapan tenaga kerja menurut status pekerjaan memberikan indikasi bahwa permasalahan ketersediaan lapangan kerja memiliki peran yang sangat penting. Pro kontra terhadap pandangan yang mengupayakan pendidikan merupakan upaya penyiapan tenaga kerja yang akan dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi tetap muncul hingga saat ini. Setidaknya sampai saat ini belum ada terobosan yang memperhatikan perencanaan kebutuhan tenaga yang *in-line* dengan jurusan pendidikan yang tersedia di berbagai wilayah. Dampak dari kondisi ini dalam konteks makro menyebabkan tenaga kerja akan kehilangan daya saing dibandingkan dengan berbagai negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan yang menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks mikro, ketersediaan angkatan kerja yang besar dan terus bertambah setiap tahunnya justru belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja akibat keahlian dan keterampilannya tidak sesuai dengan permintaan pasar. Tidak sedikit tenaga kerja yang akhirnya terpaksa menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan kompetensinya dengan konsekuensi jabatan yang tidak sesuai dan upah yang lebih rendah. Keterpaksaan ini mengakibatkan produktivitas tenaga kerja lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan yang sebenarnya;

3. Akses dan Penciptaan Lapangan Kerja

Tantangan pemerintah lainnya dalam ketenagakerjaan terkait penyediaan informasi pasar kerja. Informasi berbasis digital mampu menjangkau 94% (sembilan puluh empat persen) penduduk usia kerja berusia 15-29 tahun. Angkatan kerja yang mencakup empat generasi

(*generasi baby boomers*, gen X, generasi milenial dan gen Z) menjadi tantangan tersendiri, karena terdapat perbedaan *behavior* kerja yang signifikan antar generasi. Dari sisi akses informasi, gen milenial dan gen Z sangat familiar dan mampu akses terhadap berbagai informasi digital. Sementara gen X masih memiliki keterbatasan dan gagap teknologi, terutama gen X yang berumur di atas 50-an. Manajemen dan penataan sistem kerja di berbagai unit membutuhkan kesadaran dan penyesuaian terhadap entitas yang memang sudah berubah. Tantangan lainnya terkait dengan infrastruktur internet juga perlu mendapat perhatian. Disparitas kemampuan akses internet antar provinsi, antar wilayah dan kawasan di Indonesia masih menyisakan permasalahan yang cukup serius;

4. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan terhadap tenaga kerja tidak hanya mencakup jaminan sosial semata, tetapi perlindungan yang lebih luas seperti upah dan pembinaan hubungan industrial. Di Indonesia, penyelenggaraan jaminan sosial sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut Undang-Undang tersebut, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, berlaku program Jaminan Sosial Indonesia diselenggarakan oleh dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan, cakupan kepesertaan jaminan sosial masih cukup rendah terutama untuk jenis pekerja bukan penerima upah (BPU). Padahal kepesertaan jaminan sosial pada pekerja BPU sangat penting

untuk memitigasi resiko kecelakaan kerja dan pendapatan pasca pensiun bagi sektor informal yang cenderung lebih rentan dari sektor formal. Pola kepemilikan jaminan sosial tenaga kerja sangat menarik untuk diperhatikan. Kepemilikan jaminan kesehatan dan jaminan kecalakaan memiliki persentase di atas 30% (tiga puluh persen) dan merupakan yang tertinggi. Sementara jaminan kehilangan pekerjaan sangat rendah hanya 8,6% (delapan koma enam persen). Pola kepemilikan jaminan sosial ini terkait probabilitas manfaat yang dapat dirasakan. Jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja setiap saat bisa mengajukan *claim* dan bisa langsung merasakan manfaatnya. Tetapi terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan pensiun, mungkin masih sangat lama untuk dirasakan manfaatnya. Seringkali kita salah dalam memahami fenomena ini, dianggapnya tenaga kerja kurang memahami terhadap pentingnya jaminan kehilangan pekerjaan maupun jaminan pensiun. Sebetulnya masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya jaminan pension dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tetapi mereka memiliki kendala dalam kepercayaan pengelolaannya. Berbagai pengalaman asuransi yang selama ini banyak disalahgunakan sehingga berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jaminan yang berjangka panjang. Kondisi ini perlu diatasi dengan menunjukkan perkembangan kondisi keuangan jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan yang tersedia saat ini. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan jaminan sosial, maka dapat diharapkan tenaga kerja akan menerima perlindungan yang baik dan berkesinambungan. Bentuk perlindungan pemerintah lainnya terhadap tenaga kerja berupa penetapan upah. Hiruk pikuk penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota seakan menjadi drama rutin akhir tahun. Perseteruan antara pengusaha, dan serikat buruh menjadi acara rutin akhir tahun. Peran pemerintah dan dewan pengupahan seakan hanya menjadi pengawas

dalam perdebatan antara pengusaha dan serikat buruh. Penetapan upah minimum yang merujuk pada hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seakan menjadi pembenaran terhadap kenaikan upah minimum yang terjadi setiap tahunnya.

Dalam konteks ekonomi global, pelaku usaha dapat memiliki kebebasan yang sangat luas untuk melakukan dan membuka kegiatan usaha di manapun selama iklim usahanya mendukung dan kondusif untuk melakukan kegiatan usaha. Perselisihan pelaku usaha dan pekerja seringkali muncul dan tak terelakkan. *International Labour Organization* (ILO) menyatakan peningkatan konflik hubungan industrial sering terjadi di tengah perubahan kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi yang signifikan. Konflik hubungan industrial ini memerlukan penanganan yang lebih efektif oleh mediator dan lembaga terkait. Ke depan, kebijakan perlu difokuskan pada penguatan lembaga hubungan industrial dan peningkatan kapasitas mediator sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan kondisi global untuk menangani jumlah kasus yang terus meningkat. Karena itu, pembinaan yang berkala dan kontinu harus tetap dilakukan pemerintah agar memberikan kesempatan kerja yang memadai untuk tenaga kerja yang semakin bertambah jumlahnya.

Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2026 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan Lima Tahunan demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional teknokratik tahun 2025-2029 diarahkan pada penguatan fondasi transformasi, dengan prioritas nasional antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tema Rencana Kerja Pembangunan 2026 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, bagi pemerintah daerah Rencana Kerja Pembangunan 2026 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Arah pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan dapat menjadi acuan bagi badan usaha (BUMN/swasta) dan *non-state actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian misi pembangunan

nasional. Rencana Kerja Pembangunan 2026 akan diwujudkan dengan fokus pada isu-isu kemiskinan, pengangguran, kesehatan, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sampah, serta tata kelola pemerintahan. Didalam Rencana Pembangunan Nasional 2026, beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain adalah:

1. Peningkatan Produktivitas: fokus pada sektor pertanian dan energi untuk mencapai swasembada pangan dan energi;
2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan ekonomi;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia: pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
4. Pembangunan Infrastruktur: lanjutan pembangunan bendungan, pengendali banjir, irigasi, dan pengaman pantai;
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: efisiensi dan efektivitas pemerintahan untuk mendukung pembangunan.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki *link and match* dengan pembangunan nasional. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2026 disamping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, juga mengacu pada tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2025-2029. Tujuan pembangunan Provinsi Riau yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif, unggul, sejahtera dan inklusif;
2. Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing;

3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan lestari;
4. Mewujudkan infrastruktur yang handal;
5. Menurunkan angka kemiskinan;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah;
8. Meningkatkan pembangunan kebudayaan melayu dalam lingkungan yang agamis;
9. Membangun harmoni sosial masyarakat.

Dengan berkembangnya industrialisasi dan globalisasi yang ditandai dengan pesatnya pembangunan di segala bidang dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi serta meningkatnya jumlah tenaga kerja, sehingga masalah hubungan industrial, kesejahteraan serta perlindungan terhadap tenaga kerja masih mewarnai masalah ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Kerawanan hubungan industrial dapat disebabkan dari berbagai faktor tidak hanya berasal dari kalangan pengusaha dan pekerja saja, akan tetapi juga bersumber dari peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dinilai masih lemah sehingga sulit menghadapi situasi dan kondisi ketenagakerjaan sekarang, upaya memperkuat lembaga ketenagakerjaan guna penyelesaian hubungan industrial, sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja.

Pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, sandang dan papan, ketahanan nasional kebijakan energy alternatif di kawasan transmigrasi, mendorong pemerataan penduduk, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta strategi pemerataan investasi daerah dan merupakan bagian dari program mengatasi kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan bidang ketransmigrasian yang terbaru diperlukan pengembangan pemukiman yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan pemerataan distribusi dan

pemukiman penduduk yang berimbang serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang layak serta mempunyai kepastian hukum atas sertifikat hak milik rumah serta tanah/lahan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi saat ini, kesenjangan capaian, serta rencana capaian di masa yang akan datang merupakan masalah pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Masalah pokok ini disebabkan oleh (1) tingginya angka pengangguran, (2) rendahnya keterampilan tenaga kerja, (3) kurangnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, (4) rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta (5) masih adanya permasalahan lahan di kawasan transmigrasi.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, khususnya dibidang ketenagaakerjaan dan ketransmigrasian, maka strategi kebijakan yang diambil antara lain:

1. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
2. Pengembangan instruktur yang kompeten;
3. Pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi;
4. Pengelolaan informasi pasar kerja;
5. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
6. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
7. Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
8. Akreditasi lembaga pelatihan;
9. Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);

10. Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta(LPKS) yang kredibel;
11. Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja;
12. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna) di daerah kabupaten/kota dan provinsi;
13. Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
14. Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
15. Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia);
16. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah Tenaga Kerja Asing dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
17. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
18. Peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial;
19. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi tempat kerja pekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
20. Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial bagi mediator hubungan industrial;
21. Peningkatan pemahaman kepegawaian daerah terhadap fungsional mediator hubungan industrial;
22. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK);
23. Penyusunan Struktur dan Skala Upah di perusahaan;
24. Efektivitas pelaksanaan Dewan Pengupahan;
25. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3); dan

26. Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro di Provinsi dan Kabupaten/kota.

Dengan latar belakang telaahan kebijakan nasional maupun provinsi dan menganalisis pokok-pokok dari prioritas nasional dan Provinsi Riau maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 tetap memperhatikan serta mengoptimalkan program kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan ketrampilan bagi para pencari kerja di Kabupaten Bengkalis baik pelatihan yang bersifat *hard skill* maupun *soft skill*, meningkatkan kesempatan dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan arahan langkah-langkah implementasi visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih tahun 2025-2030 serta memprioritaskan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja untuk mendukung pelaksanaan "Program Unggulan Daerah Ke-3, yakni Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat" dengan langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain *updating* data peserta BPJS ketenagakerjaan, penyiapan Peraturan Daerah pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan, peningkatan peran Badan Usaha untuk menanggung iuran BPJS ketenagakerjaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pelaksanaan visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni ***“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia”***.

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis 2025-2030 maka misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030 adalah:

Misi 1: Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian yang berdaya saing.

Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD; mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah; serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju *good governance* dan *clean government*; meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat; penguatan nilai-nilai budaya Melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.

Misi 3: Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi, dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang mengemban tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian memiliki tugas dan tanggung jawab yang merunut pada Misi ke-1 (satu) yakni “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian Yang Berdaya Saing” yang akan ditempuh dengan strategi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan

meningkatkan kesempatan kerja. Penjabaran Misi ke-1 merupakan acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam merumuskan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi sesuai tugas dan fungsi dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akan mendukung pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Tema pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah “Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan”, dengan 3 (tiga) prioritas pembangunan yakni:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan target makro yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,4 (tujuh puluh enam koma empat) sampai dengan 76,6 (tujuh puluh enam koma enam) poin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,6% (lima koma enam persen), dan Tingkat Kemiskinan sebesar 5,57% (lima koma lima puluh tujuh persen) sampai dengan 5,12% (lima koma dua belas persen);
2. Peningkatan inovasi daerah, dengan target makro Rasio Gini sebesar 0,261 (nol koma dua ratus enam puluh satu) sampai dengan 0,266 (nol koma dua ratus enam puluh enam) poin;
3. Penyediaan infrastruktur berkelanjutan dengan target makro pertumbuhan ekonomi sebesar 4,40% (empat koma empat puluh persen) sampai dengan 4,53% (empat koma lima puluh tiga persen).

Dengan adanya tema pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2026 dengan prioritas-prioritas pembangunannya maka dijabarkan kedalam 5 (lima) isu strategis Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis 2026 antara lain:

1. Perekonomian daerah: berupa peningkatan perekonomian daerah dan transformasi ekonomi dari ketergantungan migas;
2. Infrastruktur daerah: berupa penuntasan pembangunan infrastruktur strategis, konektivitas antar wilayah dan tindak lanjut pembangunan jembatan Sumatera-Bengkalis;

3. Sumber daya manusia: berupa pemerataan pembangunan pendidikan dan kesehatan;
4. Tata kelola pemerintahan: berupa peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola PNS-PPPK dan Non ASN, peningkatan kompetensi aparatur;
5. Sosial-budaya dan agama: berupa penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan pengembangan budaya dan kehidupan beragama.

Hasil telaahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis saat ini maupun yang akan datang maka dapat dirumuskan beberapa program yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2026.

Tabel 3.1. Prioritas Daerah, Rumusan Masalah dan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2026

No.	Prioritas Daerah	Rumusan Masalah	Program
1	2	3	4
1.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat, target makro Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,6%	Angka Pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Rencana Tenaga Kerja Daerah 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja 4. Program Hubungan Industrial 5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis
Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran Straetgis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,88%
1. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,88%

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis
Tahun 2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Perekonomian Masyarakat Yang Kokoh Dan Berkeadilan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase dari penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$
1.1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			

Dalam menciptakan organisasi yang berorientasi pada hasil sangat penting bagi pemerintah agar dapat mempercepat tujuan pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan proses membangun model atau kerangka logis yang tepat. Untuk mengawal struktur logika sebab –akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan maka diperlukan adanya pohon kinerja. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja							
IK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)							
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		Meningkatnya Kesempatan Kerja					
IK: Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		IK: Tingkat Kesempatan Kerja					
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja	Terlaksananya Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan	Terlaksananya Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Pada Tahap Kemandirian
IK: 1. Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N 2. Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun N 3. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 4. Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	IK: Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	IK: 1. Jumlah Dokumen RTK Makro 2. Jumlah SDM Kab/Kota Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	IK: 1. Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 2. Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja	IK: 1. Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online 2. Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	IK: 1. Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar di WLKP Online 2. Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 3. Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	IK: 1. Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan 2. Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 3. Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	IK: 1. Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi 2. Jumlah Transmigran Yang Terlatih 3. Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan
Cross cutting:		Crosscutting		Cross cutting:			Cross cutting:
1. Kementerian Tenaga Kerja		1. Kementerian Tenaga Kerja		1. Kementerian Tenaga Kerja			1. Kementerian Transmigrasi
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau		2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau		2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau			2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
3. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		2. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		3. Mediator Kab/Kota			3. BPN
4. BNSP		3. UPT Pelatihan, UMKM dan Koperasi		4. BPJS Ketenagakerjaan			4. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis
5. UPT Pelatihan, UMKM dan Koperasi		4. Perusahaan		5. BPJS Kesehatan			5. UPT Pelatihan, UMKM dan Koperasi
6. Dinas Perindustrian				6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh			6. Dinas Perindustrian
7. Dinas Pariwisata				7. Organisasi Pengusaha (APINDO/Kadin)			7. Dinas Pariwisata
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							8. Dinas PU/ Perkim
9. LPK Swasta							9. LPK Swasta

Gambar 3.1. Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

=====

4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah proses penyusunan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai rujukan penggunaan akun belanja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 mengusulkan total pagu yang direncanakan sebesar Rp. 21.415.337.594,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagai dukungan pendanaan untuk 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, total pagu Rp. 14.680.465.293,00 (empat belas enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan rutin di sekretariat Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis termasuk pembayaran gaji sebanyak 14 (empat belas) bulan dan tunjangan sebanyak 13 (tiga belas) bulan bagi 62 (enam puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp. 11.484.569.376,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan gaji sebanyak 12 (dua belas) bulan bagi tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang;

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja, total pagu anggaran sebesar Rp. 50.156.172,00 (lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai dukungan pendanaan bagi sub kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja baik makro dan mikro;
3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, total pagu anggaran Rp. 1.247.063.660,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan kegiatan pokoknya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil;
4. Program Penempatan Tenaga Kerja, total pagu anggaran Rp. 115.949.580,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan kegiatan pokoknya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan sub kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online* serta *job fair*/bursa kerja;
5. Program Hubungan Industrial, total pagu anggaran Rp. 5.266.215.031,00 (lima milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus lima belas ribu tiga puluh satu rupiah) dengan kegiatan pokoknya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Monev Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota serta mengakomodir pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja bagi 24.000 (dua puluh empat ribu) pekerja rentan yang ada di Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menangani kemiskinan yang difokuskan pada kegiatan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan;

6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, pagu anggaran sebesar Rp. 39.745.495,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan kegiatan pokoknya Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi;
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, pagu anggaran sebesar Rp. 15.742.363,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan kegiatan pokoknya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Tabel 4.1. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2026				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		%	66,88	21.415.337.594			67,76	29.204.944.287
1.1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Kesempatan Kerja		%	66,88	21.415.337.594,00			67,76	29.204.944.286,80
I	Urusan Ketenagakerjaan							21.359.849.736				28.604.944.287
	2 07 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Dukungan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah	Kab. Bengkalis	%	100	14.680.465.293,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	18.456.527.065
	2 07 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Bengkalis	%	100	85.514.015,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	394.630.744,00
		0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Dokumen	2	69.564.435,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		3	242.006.364,00
		0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bengkalis	Laporan	4	15.949.580,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		4	152.624.380,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2026				Sumber Dana	Catatan Penting □	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 07 01 2 02	Kegiatan Admidnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase admidnistrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab. Bengkalis	%	100	11.484.569.376,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	12.118.465.928
		0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkalis	Orang/Bulan	52	11.484.569.376	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		52	12.118.465.928
	2 07 01 2 03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun	Kab. Bengkalis	%	100	672.000.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	672.000.000,00
		0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bengkalis	Dokumen	2	672.000.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	672.000.000,00
	2 07 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	%	100	1.084.062.408,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	1.716.115.935
		0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	Paket	2	15.376.078	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2	45.035.875
		0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	Paket	2	40.995.037	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2	146.604.687
		0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	Paket	2	48.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2	60.600.000
		0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	Paket	2	44.804.293	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2	121.666.258

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2026				Sumber Dana	Catatan Penting □	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
					Lokasi Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	Dokumen	1	8.500.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	13.050.000
		0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bathin Solapan	Laporan	500	623.987.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		600	1.021.959.115
		0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Bathin Solapan	Dokumen	1	302.400.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	307.200.000
	2 07 01 2 07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Yang Tersedia	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bengkalis	%	100	71.588.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	1.047.447.458
		0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Unit	1	44.212.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		65	299.865.000
		0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Bengkalis, Provinsi Riau	Unit	1	27.376.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		87	747.582.458
	2 07 01 2 08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Kab. Bengkalis	%	100	482.969.494,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	603.639.126
		0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkalis	Laporan	12	213.230.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		800	237.899.650

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2026				Sumber Dana	Catatan Penting □	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bengkulu	Laporan	12	239.539.494	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		12	335.539.476
						0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu	Laporan	1	30.200.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	30.200.000
	2	07	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bengkulu	%	100	799.762.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	1.904.227.874
						0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bengkulu	Unit	14	173.772.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		16	420.000.000
						0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bengkulu	Unit	30	33.800.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		40	119.300.000
						0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkulu	Unit	6	577.190.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		6	648.647.874

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2026				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkulu	Unit	1	15.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		7	716.280.000
	2	07	02		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	Kab. Bengkulu	%	100	50.156.172,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		93	343.233.420
	2	07	02	2	01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Kab. Bengkulu	%	100	50.156.172,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		93	343.233.420
					0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bengkulu	Dokumen	1	34.206.592,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	200.631.463,00
					0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Kab. Bengkulu	Orang	10	15.949.580,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		20	142.601.957,00
	2	07	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Calon Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terlatih	Kab. Bengkulu	%	100	1.247.063.660,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		35	1.981.027.344
	2	07	03	2	01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Bengkulu	%	100	1.184.403.324,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			1.708.286.223

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2026				Sumber Dana	Catatan Penting □	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	Kab. Bengkalis	Orang	100	500.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Sub Kegiatan ini menjadi pendukung pelaksanaan arahan tugas prioritas "Penguatan Kerjasama Pelatihan Sertifikasi Tenaga Kerja"	150	1.401.411.594
					0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun N	Kab. Bengkalis	Lembaga	1	15.949.580	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		27	117.202.251,00
					0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Bengkalis	Unit	4	18.453.744	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		10	189.672.378,00
	2	07	03	2	02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Dibina	Kab. Bengkalis	%	100	44.206.592,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			162.105.212
					0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Bengkalis	Lembaga	6	44.206.592,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		15	162.105.212,00
	2	07	03	2	04	Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan Kecil yang Meningkatkan Produktivitasnya	Kab. Bengkalis	%	100	18.453.744,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			110.635.909
					0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab. Bengkalis	Perusahaan	2	18.453.744	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		4	110.635.909,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2026				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Kab. Bengkalis	%	87	115.949.580,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ini menjadi pendukung pelaksanaan arahan tugas prioritas "Meningkatkan Koordinasi Dengan Perusahaan Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal".	90	900.000.000	
	2	07	04	2	03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Bengkalis	%	100	115.949.580,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	900.000.000	
					0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bengkalis	Orang	5000	15.949.580,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		5000	500.000.000	
					0003	Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Bengkalis	Orang	50	100.000.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		300	400.000.000	
	2	07	05		Program Hubungan Industrial *** Program Unggulan	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlindungi	Besaran Kasus Yang Diselesaikan	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	%	85	5.266.215.031,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	6.924.156.458	
	2	07	05	2	01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	%	20	232.959.286,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		20	477.948.815

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2026				Sumber Dana	Catatan Penting □	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Tendaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Tendaftar di WLKP Online	Kab. Bengkalis	Perusahaan	20	68.559.286,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		20	106.859.396
					0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Bengkalis	Perusahaan	10	64.800.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		10	68.364.212
					0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Bengkalis	Laporan	1	99.600.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	302.725.207
	2	07	05	2	02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	%	100	5.033.255.745,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	6.446.207.643

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2026				Sumber Dana	Catatan Penting □	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Bengkulu	Perkara	25	29.169.146	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		25	139.667.574
					0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaiannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	Kab. Bengkulu	Perkara	26	29.169.146	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		26	150.797.297
					0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konferderasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konferdasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Bengkulu	Asosiasi & Serikat Pekerja	22	25.949.580	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		22	81.307.981
					0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Bengkulu	Lembaga	1	104.213.277	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1	221.580.333

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2026				Sumber Dana	Catatan Penting □	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027										
					Lokasi Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
		0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bengkulu	Orang	24000	4.844.754.596	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan "Program Unggulan Daerah Ke-3 : Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat" dengan langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain updating data peserta BPJS ketenagakerjaan, penyiapan Perda pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan, peningkatan peran Badan Usaha untuk menanggung iuran BPJS ketenagakerjaan	34000	5.852.854.458								
2.	Urusan Ketransmigrasian								55.487.858,00			600.000.000									
	3	32	02							Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi □	Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan		%	100	39.745.495,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	300.000.000	
	3	32	02	2	01					Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terselenggaranya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		%	100	39.745.495,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	300.000.000	
										0004	Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Dokumen	1	39.745.495	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			300.000.000
	3	32	03							Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi		%	100	15.742.363,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	300.000.000	

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2026				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3 32 03 2 01	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		%	100	15.742.363,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		100	300.000.000
		0006 Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		Orang	20	15.742.363	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		43	300.000.000
					TOTAL			21.415.337.594				29.204.944.287



Bengkalis, 10 Oktober 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkulu Selatan,

SALMAN ALFARISI, S.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820519 201102 1 001

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2026 disusun berdasarkan petunjuk teknis dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen perencanaan yang ada. Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis ini diharapkan pelaksanaan program kegiatan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ada di Kabupten Bengkalis. Terkait hal-hal penting maka Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan tetap mempedomani peraturan perundangan-undangan.

Demikianlah Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2026 ini disusun. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan diharapkan dari semua unsur yang terlibat dapat memberikan masukan demi penyempurnaan dokumen ini.



Bengkalis, 10 Oktober 2025

Pemula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis,

SALMAN ALFARISI, S.T.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19820519 201102 1 001